KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

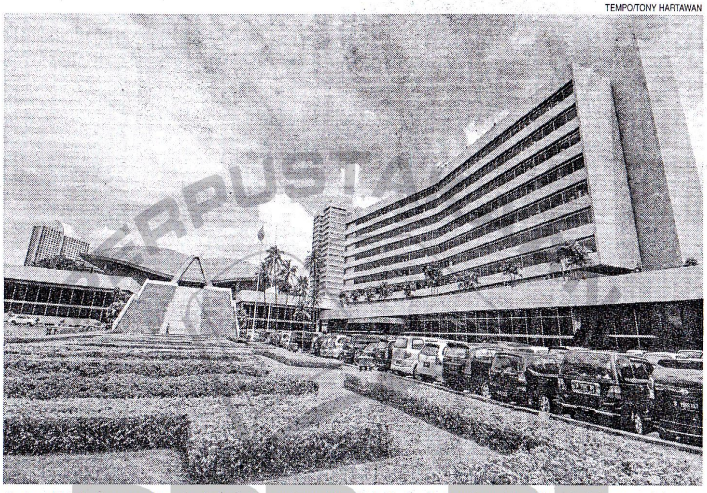
Judul : Usul Proyek Gedung DPR Kembali Menguat
Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Usul Proyek Gedung DPR Kembali Menguat

Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 1,6 triliun.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

TEMPO/TONY HARTAWAN



Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah di Senayan, Jakarta.

JAKARTA – Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat kembali muncul seiring dengan keinginan Dewan menambah anggaran DPR pada 2018. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anton Sihombing, mengatakan hal itu merupakan keinginan para anggota Dewan. "Gedung sudah miring, kapasitas juga berlebihan," ujar dia, Selasa lalu. Anggota Dewan saat ini adalah 560 orang. Rata-rata setiap anggota Dewan memiliki dua staf dan lima tenaga ahli. "Orang semakin bertambah, tapi ruangan tetap," ujar Anton.

Rencana pembangunan gedung DPR sebenarnya sudah muncul sejak 2006. Empat tahun kemudian, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan sudah memiliki gambaran lengkap rencana gedung baru. Namun rencana itu gagal setelah mendapat kritik dari masyarakat.

Keinginan membangun gedung DPR kembali muncul pada 2015. Anggarannya sekitar Rp 1,6 triliun dengan dana *multiyear*. Ketika itu, Presiden Joko Widodo diagendakan meneken prasasti gedung yang bakal dibangun itu. Namun rencana penandatanganan itu batal. Meski begitu, DPR tetap mendapatkan jatah Rp 564 miliar dalam APBN 2016 yang disebutsebut untuk pemeliharaan gedung parlemen.

Satu tahun kemudian, usul pembangunan gedung baru kembali muncul. Alih-alih untuk membangun gedung, kali ini Dewan menyebut akan membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Gagasan itu muncul setelah sejumlah akademikus serta budayawan mengusulkannya dalam pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Maret tahun lalu. Rencananya, dana pembangunan perpustakaan diambil dari anggaran gedung baru DPR. Namun, hingga posisi Ade diambil alih Setya Novanto, rencana pembangunan perpustakaan itu tidak terwujud.

Anggota Badan Anggaran DPR, Robert Joppy Kardinal, membenarkan bahwa saat ini sejumlah anggota Dewan mulai kembali mendorong usul pembangunan gedung baru di kompleks DPR. Namun ia enggan menyebutkan siapa dan gedung seperti apa yang bakal diusulkan untuk dibangun. "Saya belum tahu detail, tanya BURT," ujarnya. "Mungkin mereka ingin membuat perpustakaan."

Munculnya usul pembangunan gedung baru itu seiring dengan rencana Dewan untuk menaikkan anggaran DPR dari Rp 4,26 triliun pada tahun ini menjadi Rp 7,25 triliun tahun depan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan banyak yang tak masuk akal dalam usul penambahan anggaran itu. Salah satunya mengenai Program Dukungan Manajemen Pelaksana Tugas Teknis Lain di Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 2,32 triliun. "Program itu tidak transparan rinciannya," kata Yenny. Ia curiga anggaran pembangunan gedung akan dimasukkan ke sana. "Kami sudah prediksi rencana pembangunan gedung baru akan dilanjutkan." ● HUSSEIN

Banyak Cara Menambah Anggaran

Berbagai permintaan penambahan anggaran diajukan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, dari anggaran pembelian parfum ruangan, tambahan tunjangan gaji, pembangunan gedung baru, hingga dana aspirasi anggota Dewan. Hal ini menggerus keuangan negara.

1. Membuat rumah aspirasi daerah. DPR meminta tambahan dana Rp 150 juta per tahun per anggota Dewan untuk sewa rumah di daerah.
2. Parfum ruangan anggota Dewan. Anggaran Rp 2,3 miliar.
3. Membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara untuk anggota DPR. Biaya Rp 570 miliar.
4. Rencana pembangunan 7 proyek DPR dengan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.
5. DPR meminta dana aspirasi dinaikkan 150 kali menjadi Rp 20 miliar untuk setiap anggota Dewan. Dengan jumlah anggota DPR yang mencapai 560, akan diperlukan dana tambahan Rp 11 triliun.
6. DPR meminta pembentukan polisi parlemen. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 800 miliar.
7. Penambahan tunjangan gaji, dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan fungsi pengawasan, hingga bantuan listrik dan telepon. Nilai tunjangan yang diusulkan berkisar Rp 43-48 juta per bulan per anggota Dewan. Nilai total lebih dari Rp 288 miliar per tahun.

DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER
● AGUNGS

PERPUSTAKAAN DPR-RI